

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **4.1. Kondisi Demografis Papua**

Jumlah penduduk Kota Jayapura pada tahun 2016 berjumlah 288.786 orang. Sebanyak 154.096 orang berjenis kelamin laki-laki, dan 134.690 berjenis kelamin perempuan yang tersebar ke dalam 67.994 rumah tangga. Meskipun distrik Muara Tami merupakan distrik secara kewilayahan paling luas, namun memiliki penduduk paling kecil, yaitu 12.626 orang dari total jumlah penduduk kota Jayapura. Pusat atau konsentrasi penduduk masih di sekitar ibukota, yaitu Abepura dengan jumlah penduduk sebesar 82.090 orang. Adapun di distrik lain seperti Heram (45.278 orang), Jayapura Selatan (75.534 orang), dan Jayapura Utara (73.258 orang).

Berdasarkan agama, sebanyak 283.493 orang memeluk Kristen atau sebanyak 45,25 % dari total penduduk. Adapun Islam dan Katolik sebanyak 40,56 %, dan sisanya Hindu dan Budha sebesar 13,48 %. Pemeluk agama-agama ini didukung oleh sarana peribadatan. Kristen memiliki 301 unit gereja, Katolik memiliki 65 unit gereja, Islam (Muslim) memiliki 193 unit masjid, Hindu memiliki 5 Pura, dan Budha memiliki 6 Vihara yang tersebar di berbagai tempat di Kota Jayapura.

Penduduk Jayapura tidak hanya berasal dari Papua, tetapi juga banyak berasal dari orang pendatang seperti Batak, Minang, Minahasa, Bugis, Buton, Makasaar, Jawa dan sebagainya. Mereka telah menjadi warga Kota Jayapura dan telah beranak-pinak di kota ini. Keberadaan mereka ditandai oleh selain Bahasa, juga aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap hari. Tidak sedikit pula dari mereka yang berprofesi sebagai PNS, TNI/Polri, dan berbagi profesi kantoran lainnya.

Dibanding kabupaten/kota lain di provinsi Papua, pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura yang menjadi tertinggi telah berimplikasi pada meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Sektor tersier

dimana perdagangan, jasa dan keuangan mendominasi kontribusi terhadap pembentukan PDRB dan pertumbuhan ekonomi. Disparitas pendapatan yang tajam dan masih tingginya angka kemiskinan (31.95%) serta angka pengangguran berdasarkan angka partisipasi kerja mencapai 57.26%. Terdapat kelemahan lainnya yaitu pertanian sebagai penopang perekonomian daerah dalam pemanfaatannya belum optimal. Meningkatnya industri pariwisata dan kunjungan wisatawan domestik memberikan peluang dalam berbagai sektor dapat berkembang, terutama akan adanya peningkatan pendapatan bagi penduduk asli Port Numbay di Kota Jayapura.

Ketersediaan fasilitas perdagangan dan jasa menunjang perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa, juga mendorong kerah peningkatan penanaman modal di sektor jasa perdagangan dan pariwisata serta lainnya. Diperlukan kebijakan proteksi terhadap penduduk asli Port Numbay supaya lebih diprioritaskan dalam pengambilan kesempatan untuk dapat bersaing secara sehat dalam bidang perdagangan, penanaman modal dan sektor pariwisata. Hal tersebut mengingat kondisi ekonomi penduduk asli Port Numbay dalam konteks persaingan ekonomi yang terjadi di kota Jayapura, masih berada pada level yang rendah dan minimnya permodalan serta ketrampilan yang dimiliki dengan kondisi sumber daya alam yang semakin terkuras.

Masih bersandarnya dengan kegiatan ekonomi subsisten seperti meramu sagu, menangkap ikan di laut, berkebun ladang, membuat keterampilan dan pengetahuan mereka menjadi tertinggal dengan etnis lainnya di kota Jayapura yang berkompetisi di bidang perdagangan dan jasa yang bersifat ekonomi modern dengan mengutamakan keuntungan daripada ekonomi subsisten. Tetapi dengan memanfaatkan wilayah hak ulayat adat yang berada di sepanjang pesisir pantai yang dijadikan objek wisata pantai, maka sebagian dari penduduk Asli Port Numbay telah berkompetisi dalam bidang jasa walaupun dalam skala yang masih kecil dan permodalan yang masih terbatas.

## **4.2. MMP: Sejarah dan Wadah Perjuangan Muslim**

Mengenai awal mula terbentuknya MMP ini, peneliti mengalami kesulitan mengurainya berdasarkan literatur. Sebab, tidak ada literatur yang mengurai perjalanan MMP dari awal. Peneliti hanya melakukan konstruksi "sejarah" berdirinya MMP melalui penuturan orang-orang Muslim Papua. Misalnya, dikutip dari sambutan Ketua Umum MMP periode 2007, H. Arobi A. Aituarauw, SE, MM, bahwa MMP berdiri berawal dari kegelisahan segelintir orang Muslim Papua. Ia menuturkan:

Di waktu yang lalu, ada suatu kaum, bergerak melakukan perjalanan panjang dalam kegelisahan dan letih. Di benak mereka tersimpan sebuah tanda tanya: "siapakah kami sebenarnya?". Ketika jawaban tak kunjung datang, perjalanan mencari jati diri itu, terus membentang semakin panjang, jauh dan berliku.

Setelah berhenti sejenak, maka pada tanggal 21 November 1999, 47 orang Papua dari berbagai latar belakang suku, pendidikan dan profesi, bersepakat merumuskan jawaban atas pertanyaan "siapa kami sebenarnya?".

Hari itu, lahirlah Solidaritas Muslim Papua, sebagai wujud penemuan eksistensi dan jati diri. Papua dan Muslim, adalah dua subkultur yang menyatu dalam eksistensi kami. Sadar akan kenyataan itu, institusi kecil yang baru berdiri ini, tak jenuh berusaha menjahit serat-serat yang terputus dan jatuh. Walau dengan tertatih-tatih, Solidaritas ini terus bergerak mengasah tanggung jawab dan hakekat keberadaan dirinya.

Kami sadar, keberadaan orang-orang Muslim Papua, pada hakekatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat adat Papua. Solidaritas Muslim Papua, lantas menjadi jembatan penghubung yang bertugas memberi makna pada harmonisasi peran dan tanggung jawab sebagai seorang anak Papua, sekaligus seorang Muslim.

Untuk merefleksikan tanggung jawab itulah, maka Mukhtamar pertama yang telah kami laksanakan dari tanggal 10 sampai 13 April 2007 lalu, sepenuhnya kamiabdikan untuk melakukan penataan internal terhadap individu maupun institusi, termasuk perubahan nama organisasi dari Solidaritas Muslim Papua menjadi Majelis Muslim Papua.

Tugas utama dari setiap Muslim adalah menjadi Rahmat bagi semesta alam, dan tugas utama setiap orang Muslim Papua adalah menjadi Rahmat bagi tanah Papua. Bukan hanya menjadi beban, atau malah membawa bencana. Visi dan tanggung jawab untuk menjadi rahmat bagi tanah tercinta ini adalah citra diri secara individu maupun jamaah.

Negeri ini adalah pemberian Allah, tanah ini adalah wujud Kasih Tuhan, Kekayaan sumber daya alamnya adalah anugerah agung Sang Maha Pencipta, karena itu, di mana saja orang Muslim Papua berada, ia wajib menebarkan kebaikan, seraya berjuang memakmurkan negeri ini.

Kehadiran Majelis Muslim Papua, sungguh tidak dimaksudkan untuk membangun jamaah yang eksklusif. Tidak juga untuk melancarkan Islamisasi. Pasti, Majelis Muslim Papua tidak untuk membangun fundamentalisme agama, apalagi menjurus kepada gerakan-gerakan radikal.

Kami hadir untuk mengambil tanggung jawab. Bergandengan tangan dengan Pemerintah Daerah untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Majelis Muslim Papua hadir untuk bahu membahu dengan para pemimpin agama dan pemimpin-pemimpin Gereja, yang selama ini telah bekerja keras menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Itulah sebabnya, Sikap Dasar, yang sekaligus menjadi platform Majelis Muslim Papua adalah: Moderat, Toleran, Tegak, Seimbang dan Dialog.

Dalam statuta MMP dijelaskan bahwa "Organisasi ini bernama Majelis Muslim Papua, disingkat MMP, yang sebelumnya bernama Solidaritas Muslim Papua, didirikan di Jayapura pada tanggal 21 November 1999 M / 12 Sya'ban 1420 H untuk jangka waktu yang tidak ditentukan". Dalam Bab II tentang Sifat, Azas, Tujuan dan Identitas MMP (Pasal 4) disebutkan bahwa Majelis Muslim Papua adalah Organisasi kemasyarakatan untuk *Amar Ma'ruf Nahyi Munkar* (menegakkan kebenaran dan mencegah kebatilan), perbaikan kualitas hidup kaum Muslim Papua dan masyarakat Papua pada umumnya. Majelis Muslim Papua berpegang pada Norma Agama, Adat dan Nilai-nilai Kemanusiaan, untuk mencapai Tujuan:

1. Terwujudnya tatanan hidup taqwa (*hablum minallah*) serta solidaritas insani antar segenap umat dalam kehidupan sehari-hari (*hablum minannas*) berdasarkan prinsip-prinsip dasar *rahmatan lil 'alamin* (rahmat untuk semesta alam) serta *lakum dienukum wal yadin* (bagimu agamamu dan bagiku agamaku).
2. Terwujudnya kesejahteraan umat Islam di tanah Papua melalui kemajuan pendidikan, pelayanan kesehatan, kemandirian ekonomi, kelestarian lingkungan hidup, emansipasi sosial-budaya dan penegakkan hak azasi manusia”.

Di bagian lain statuta MMP disebutkan pula mengenai atribut organisai (Pasal 19) bahwa, Majelis Muslim Papua memiliki atribut-atribut organisasi yang terdiri dari Lambang, Bendera, Hymne dan Mars. Pada Pasal 20, dijelaskan mengenai lambang MMP. Lambang Majelis Muslim Papua adalah:

1. Pulau Papua dengan warna dasar Hijau yang dilingkari Bulan Bintang dengan warna dasar Putih.
2. Makna Lambang Majelis Muslim Papua adalah:
  - a. Pulau Papua bermakna satu kesatuan kultural yang meliputi tujuh wilayah adat.
  - b. Bulan Bintang bermakna nilai-nilai ketauhidan.

- c. Pulau Papua dengan warna dasar hijau bermakna kemakmuran dan kedamaian.
- d. Bulan bintang dengan warna putih bermakna keluhuran.



Gambar 4.1 Lambang MMP  
Sumber: MMP Jayapura, 2016

Adapun mengenai bendera organisasi disebutkan pada Pasal 21: Bendera Majelis Muslim Papua Berbentuk segi empat dengan perbandingan panjang dan lebar yaitu 4:3 dengan warna dasar hitam yang memiliki garis horizontal emas di bagian atas dan bawah, serta di tengah-tengahnya lambang Majelis Muslim Papua.

### 2.3 Visi dan Misi Majelis Muslim Papua

MMP sebagai sebuah wadah perjuangan memiliki visi: "Majelis Muslim Papua menjadi *rahmatan lil alamin*". Visi ini kemudian diturunkan menjadi "*rahmatan lil Papua*" yang terjabat dalam misi (1) sebaiknya-baiknya umat, (2) saksi kemanusiaan, dan (3) kekhalifahan *fil ardhi*. Visi misi tersebut terinspirasi oleh QS. Al Anbiyaa 107 mengenai status Nabi Muhammad SAW, "*Dan Kami tidak Mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.*" Visi misi tersebut menjadi semangat

perjuangan MMP dan arah pengembangan organisasi ke depan. Visi misi ini dirumuskan pertama kali pada Mukhtar I tanggal 13 April 2007 di Jayapura, Papua. Ini juga menjadi cikal-bakal terhimpunnya kelompok-kelompok Muslim yang ada di Papua menjadi satu organisasi.

Majelis Muslim Papua (selanjutnya disingkat MMP) merupakan representasi orang Muslim di Papua. Organisasi ini merupakan kelanjutan dari Solidaritas Muslim Papua (SMP) yang didirikan oleh 47 tokoh Muslim di tanah Papua dari berbagai suku pada tanggal 21 November 1999. Pembentukan organisasi ini tidak terlepas dari konteks kemunculan beberapa organisasi lokal Papua dan penganut agama Kristen saat isu dan gerakan separatis merebak tahun 1999 (Alhamid, 2013: 452-453). MMP pun tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dari persoalan besar Papua, termasuk politik yang sangat dinamis. Demikian pula, hubungan Kristen-Muslim sering mengalami fase 'kritis' yang dipicu oleh banyak faktor, termasuk posisi Muslim yang sering diidentikkan dengan pendatang dan Kristen dianggap oleh kalangan internalnya sebagai agama pertama dan utama di Papua.

Pembentukan Majelis Muslim Papua ingin menunjukkan dan menolak anggapan yang selama ini lekat bahwa Islam itu identik dengan Indonesia, dan menunjukkan bahwa tidak semua penduduk Papua adalah penganut Kristen. MMP juga ingin menjembatani komunikasi antara imigran Muslim dan masyarakat Kristen Papua. Lebih dari itu, MMP bertujuan untuk lebih mengenalkan lebih dalam mengenai Islam di kalangan masyarakat pribumi Papua. MMP justru tidak menginginkan organisasi Muslim dari luar yang tidak punya akar kuat di masyarakat Papua memberikan pengaruh, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dianggap memberdayakan pengaruh Muslim pendatang. MMP juga berpartisipasi sebagai organisasi Islam dalam penegakan perjuangan HAM di tanah Papua, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi (Pamungkas, 2011: 133-155, Alhamid, 2013: 453).

Menurut Cahyo Pamungkas (2011) MMP didirikan untuk 'menolak usulan bahwa Islam identik dengan Indonesia', untuk membangun 'jembatan komunikasi antara imigran Muslim dan masyarakat Papua Kristen', untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat asli Papua, hak asasi manusia dan untuk memerangi ketidaksetaraan ekonomi, dan untuk melawan pengaruh organisasi Islam Indonesia yang biasanya fokus pada Muslim migran. Perannya dalam menjembatani kepentingan antara kubu Kristen dan Islam telah diuji pada 2007 dalam rangka pendirian Institut Agama Islam Al-Fatah atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al-Fatah di Jayapura. STAIN Al-Fatah diprotes oleh Asosiasi Pendeta Indonesia dan kelompok lainnya, dan Thaha Alhamidlah yang sangat terlibat dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dengan meyakinkan gubernur Papua bahwa orang Papua juga akan mendapatkan keuntungan dari institut tersebut (Pamungkas, 2011: 147-148).

Terlepas dari tingginya tingkat integrasi ke kalangan Muslim Papua dan peran utama mereka dalam organisasi dan institusi Islam, Otonomi Khusus Papua dapat menghantui orang-orang Papua Hadhramis dengan cara-cara yang sebelumnya tidak terpikirkan. Perhatikan kasus Mohammad Musa'ad, yang merupakan salah satu negosiator kebijakan Otonomi Khusus, namun ditolak sebagai calon wakil gubernur pada tahun 2005 karena nenek moyangnya di Arab (Pamungkas 2011: 133, 143). International Crisis Group (2006: 8) juga mengakui kasusnya: 'Meskipun ibu Musa'ad adalah seorang Papua dari Fak-fak, ayahnya keturunan Arab.'

Menurut Majelis Rakyat Papua (MRP), tubuh yang memiliki hak untuk menyaring kandidat sesuai dengan undang-undang Otonomi Khusus, 'orang asli Papua adalah orang dari ras Melanesia, yang ibu dan ayahnya adalah orang Papua, dengan warisan patrilineal, dan yang memiliki basis budaya dengan bahasa lokal, suku Papua, sebuah desa tempat dia berada, dan tradisi adat istiadat. Namun, ada kemungkinan bahwa seseorang dapat menjadi kandidat jika dia diterima dan diakui sebagai penduduk asli Papua oleh masyarakat adat setempat, dan

Mohammad Musa'ad mendapat dukungan dari Bombarari suku di wilayah Fak-fak. Namun, dia masih ditolak karena, ketika salah seorang anggota MRP menjelaskan kepada ICG, banyak anggota MRP lebih memilih 'orang Papua berdarah penuh, dengan kulit hitam dan rambut keriting' (Wanggai 2008: 206).

Meskipun kesadaran sejarah mengenai kehadiran Islam di Tanah Papua telah memperlihatkan hasil yang baik, tetapi ketegangan antara Islam-Kristen masih terus terjadi dalam skala yang lebih 'halus'. Dapat dikemukakan, bahwa masih ada penentangan terhadap kenyataan bahwa terdapat sejumlah orang asli Papua yang telah memeluk agama Islam. Pada saat bersamaan, berkembang sebuah wacana bahwa Islam merupakan agama yang dibawa oleh pendatang, baik pendatang Arab, Maluku, Jawa maupun Sulawesi. Sehingga dengan demikian, agama resmi orang asli Papua adalah Kristen. Realitas ini, tentu akan semakin memperkeruh suasana dan menciptakan ketegangan-ketegangan antara pemeluk Islam di satu pihak, dan pemeluk Kristen di pihak lain. Bukan sesuatu yang tidak mungkin, jika permasalahan di Papua saat ini, seperti ketidakadilan sosial dan diskriminasi rasial yang semakin menguat akan mengarah kepada 'pengkambinghitaman' pemeluk agama Islam, agama yang dianggap sebagai agama orang Jakarta atau Indonesia di luar Papua.

Menurut peneliti, hal-hal semacam ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan kehidupan harmonis yang perlahan mulai terbangun di Papua pasca kejatuhan Suharto. Kondisi ini tentu akan dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum dan organisasi yang ingin memperkeruh kondisi di tanah Papua. Padahal, sejatinya Papua adalah 'tanah damai' bagi semua pihak, suku, agama, dan ras. Politik 'Papua tanah damai' sejatinya terus diperjuangkan melalui relasi-relasi dan dialog-dialog liberatif antara Islam-Kristen di daerah ini. Para pemimpin agama, khususnya Islam dan Kristen seyogyanya lebih terbuka dan tetap mengedepankan sikap inklusif demi kemajuan Papua.

### **4.3. Program Kerja MMP**

Program Kerja MMP adalah sebagai penjabaran substansi kehadiran Majelis Muslim Papua yang dirumuskan dalam Mukhtamar I Solidaritas Muslim Papua untuk menjadi pedoman dalam pengembangan dan peningkatan program yang berkesinambungan guna mewujudkan tujuan Majelis Muslim Papua. Adapun tujuan dari pokok-pokok program kerja Majelis Muslim Papua adalah untuk menjadi pedoman kerja bagi Majelis Muslim Papua dalam mewujudkan tujuan secara bertahap dan berkesinambungan.

Secara ringkas, program-program kerja MMP yang dirumuskan mencakup beberapa hal, sebagaimana dapat dilihat pada penjabaran program kerja yang dikutip dari Hasil-hasil Mukhtamar MMP tahun 2017, sebagaimana berikut:

1. Memperjuangkan penegakkan hak azasi manusia, hak ekonomi, hak budaya, hak atas keadilan dan emansipasi sosial serta hak-hak sipil politik bagi masyarakat muslim Papua.
2. Mencegah terjadinya proses pemiskinan manusia dan penghisapan sumber daya alam secara tidak bertanggungjawab.
3. Membina kerukunan dan suasana hidup harmonis atas dasar solidaritas sebagai sesama masyarakat adat dan sebagai sesama umat beragama (Kasih dan Persaudaraan sejati) serta sebagai sesama manusia demi kemuliaan harkat dan martabat manusia (hak azasi manusia).
4. Membina tata kehidupan spiritual di kalangan kaum muslim Papua, untuk mencapai kualitas hidup berbudaya, sejahtera lahir dan bathin serta sanggup menjalankan misi Kekhalifahan di tanah Papua.
5. Menggalang berkembangnya tatanan kehidupan sosial ekonomi dan kebudayaan dalam lingkup komunitas terkecil setingkat dusun/kampung.
6. Kegiatan lain yang relevan dengan visi, tujuan dan komitmen pergerakan Majelis Muslim Papua.
7. Pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan

- di kalangan muslim Papua yang berada di dusun/kampung.
8. Pengembangan pendidikan dakwah dalam rangka peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat muslim Papua.
  9. Membangun kemitraan strategis dan jaringan kerja serta kerjasama antar Ormas Islam, OKP Islam, Organisasi keagamaan lainnya, Organisasi Pemerintah, Organisasi non-Pemerintah dan *Indegineous People Organization* dalam dan luar negeri.
  10. Pengembangan kapasitas institusi guna melaksanakan fungsi dan peran secara optimal untuk mencapai tujuan Majelis Muslim Papua.
  11. Mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana ibadah, baik secara partisipatif dan kemandirian pada wilayah-wilayah potensi pengembangan dakwah.
  12. Perlu adanya *data base* potensi umat Islam di tanah Papua.
  13. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bidang kesehatan di kalangan Muslim Papua.
  14. Perlindungan masalah hak-hak perempuan dan anak Muslim Papua.

Program-program kerja di atas, oleh MMP dilakukan melalui beberapa pendekatan. *Pertama*, pelayanan. Adalah program kerja Majelis Muslim Papua yang sifatnya memberikan pelayanan, baik dalam bentuk sarana dan prasarana serta dalam bentuk lainnya, seperti dakwah, penelitian dan sebagainya. *Kedua*, kemandirian. Adalah program kerja Majelis Muslim Papua yang sifatnya mandiri yang dilakukan oleh Majelis Muslim Papua, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tanpa keterlibatan atau intervensi dari lembaga lainnya. *Ketiga*, Adalah program kerja Majelis Muslim Papua yang sifatnya memberikan pendampingan kepada segala permasalahan yanga terkait dengan eksistensi umat muslim di Papua dan atau masyarakat muslim Papua khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. *Keempat*, partisipasi. Adalah

program kerja Majelis Muslim Papua yang melibatkan diri dalam sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak di luar Majelis Muslim Papua. *Kelima*, kemitraan. Yaitu program kerja Majelis Muslim Papua yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan kerjasama dengan pihak di luar Majelis Muslim Papua. *Keenam*, edukasi. Yaitu program kerja Majelis Muslim Papua yang dilaksanakan dalam bidang pendidikan non-formal ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.

#### **4.4. Struktur Kepengurusan Majelis Muslim Papua**

Sebagai wadah Muslim di Papua, MMP memiliki struktur kepengurusan yang diharapkan menjalankan roda organisasi dan mampu mengakomodir serta memperjuangkan kepentingan kelompok Muslim di Papua. Pada bulan April 2017 yang lalu, MMP melaksanakan Muktamar II di Kota Jayapura. Dari muktamar tersebut dihasilkan beberapa keputusan, termasuk kepengurusan MMP hingga lima tahun mendatang. Secara sekilas, pengurus MMP periode 2017-2022 dapat dilihat pada lampiran 1. Orang-orang yang telah dipilih tersebut mewakili beberapa unsur, seperti etnis, asal daerah, profesi, dan tokoh adat. Di antara mereka ada yang merupakan orang asli Papua (Muslim) dan juga banyak yang merupakan Muslim pendatang.

Uraian bab ini memberikan ulasan yang dapat menjadi kerangka pikir awal memahami Muslim sebagai komunitas dan MMP sebagai sebuah organisasi. MMP dapat dikatakan, jika merujuk pada beberapa ulasan di atas, sebagai sebuah organisasi yang tidak hanya bergerak murni pada wadah perkumpulan Muslim di Papua. Akan tetapi, MMP juga terdapat aktivitas yang lebih mengarah pada tuntutan (politik). Hal ini merupakan wujud 'pergeseran' peran organisasi yang semula murni sebagai wadah perkumpulan Muslim, beranjak menjadi aktivitas yang bernuansa politis karena di dalamnya berisi tentang tuntutan-tuntutan kepada pemerintah daerah untuk mengakomodasi kepentingan kelompok Muslim di Papua.

Pengurus yang terlibat dalam MMP saat ini tidak semuanya berasal dari Papua, karena terdapat beberapa orang yang berasal dari luar. Mereka adalah orang Muslim yang sudah menetap lama dan memiliki perhatian yang cukup besar terhadap Muslim di Papua. Oleh karena itu, MMP telah menjadi wadah besar dan tempat Bersama bagi kaum Muslimin di Papua. Namun demikian, organisasi ini dalam perjalanannya juga masih terus melakukan pembenahan-pembenahan dalam rangka menjadi payung bagi semua orang dan tidak hanya terbatas pada Muslim sebagai bentuk penyebaran Islam sebagai agama rahmat bagi semua orang. Mengenai struktur kepengurusan MMP, dapat dilihat pada lampiran disertasi ini.